

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Pada akhir abad ke 20 hingga awal abad ke 21 telah ditandai dengan adanya suatu proses penyatuan dunia yang menjadi sebuah ruang tanpa batasan tertentu. Proses tersebut merupakan proses yang dinamakan dengan globalisasi. Globalisasi telah terjadi hampir pada setiap bidang yang ada, termasuk juga terhadap bidang ekonomi. Globalisasi terhadap bidang ekonomi ini menimbulkan suatu tantangan tersendiri bagi institusi negara dalam mengatur lalu lintas tenaga kerja, barang, dan jasa. Untuk dapat menjawab tantangan tersebut, maka banyak negara di dunia kemudian cenderung memilih untuk mengintegrasikan ekonomi mereka berdasarkan kedekatan geografis. Kecenderungan inilah yang sering dinamakan regionalisme.

Salah satu contoh regionalisme tersebut adalah *Association of South East Asian Nations (ASEAN)*. Meskipun tidak terlalu mengkhususkan pada kerjasama dalam bidang ekonomi, namun ASEAN juga tidak melalaikan perkembangan perekonomiannya. Hal ini terbukti dengan keberhasilan negara-negara anggotanya dalam meningkatkan suatu nilai perdagangan.

Pasca krisis moneter yang melanda hampir diseluruh kawasan Asia pada tahun 1997, ASEAN mulai tertarik untuk dapat bekerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Timur Laut terutama dengan Republik Rakyat

China (RRC), Jepang, dan Korea Selatan. Menyadari akan pentingnya peranan dan kekuatan yang dimiliki oleh ketiga negara tadi, terutama dalam membantu pemulihan perekonomian negara-negara ASEAN, maka kesepuluh negara anggota ASEAN berinisiatif untuk dapat mengembangkan kerjasama regional yang lebih luas. Dan pada akhirnya terciptanya suatu kerjasama yang kemudian disebut dengan ASEAN Plus Three.

Munculnya forum kerjasama ASEAN Plus Three tersebut telah memberikan suatu pandangan pemikiran bagi penulis untuk dapat mengangkat tema mengenai kerjasama ASEAN, terutama di bidang ekonomi dengan negara China. Melalui hal-hal tersebut kemudian penulis mengangkat sebuah judul ” Peran Pemerintah China Dalam Kerjasama ASEAN Plus Three ” sebagai permasalahan yang akan diteliti.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Sebenarnya globalisasi bukanlah merupakan suatu fenomena baru, dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Salah satu ciri globalisasi adalah menghilangnya batas-batas antar negara. Seiring dengan berkembangnya teknologi transportasi, alat komunikasi, dan juga sistem perbankan maka proses globalisasi dapat dengan mudah berkembang. Dalam bidang ekonomi juga telah terjadi globalisasi. Dinamika ekonomi internasional sejak tahun 1980-an telah ikut berperan dalam mempercepat proses globalisasi ekonomi. Pada saat itu banyak negara industri baru dan negara-negara yang sedang berkembang merubah kebijakan ekonominya, sehingga perdagangan antar negarapun semakin aktif.

Negara China yang lebih menitikberatkan kebijakannya pada pembangunan ekonomi dengan strategi meningkatkan kekuatan perekonomiannya ternyata cukup berhasil. Angka pertumbuhan ekonomi China meningkat dengan cepat, bahkan saat ini China telah menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. China merupakan negara komunis dengan sistem terpusat. Kemajuan pembangunan yang berhasil dicapai China dalam beberapa dekade terakhir menjadi perhatian utama bagi semua kalangan, baik kalangan akademis, praktisi, media, maupun kalangan wirausaha. Betapa tidak, kemajuan pembangunan ekonomi China memasuki era-era yang menunjukkan potensi dan prospek yang baik. Kemajuan pembangunan tersebut didukung oleh sistem pemerintahan yang terpusat. Saat ini, banyak argumen-argumen di kalangan akademis yang menyatakan bahwa China merupakan masa depan Asia dan dunia. Argumentasi yang menyatakan tendensi bahwa China adalah kekuatan masa depan dunia, memang dilihat dari angka-angka menakjubkan yang ditunjukkan oleh China, termasuk data-data statistik pertumbuhan ekonomi China, anggaran pertahanan China, data demografis China, serta data keikutsertaan China dalam kerjasama tingkat regional dan tingkat global. Keikutsertaan China dalam berbagai kerjasama ekonomi menunjukkan besarnya kepentingan nasional China terhadap pemenuhan tuntutan dan kebutuhan ekonomi domestik. Hal ini juga sekaligus digunakan China untuk membantu menuntaskan masalah-masalah domestik yang berkaitan dengan ekonomi seperti kemiskinan dan keterbelakangan.

Banyak negara yang cenderung lebih memilih melakukan regionalisme, terutama pada bidang ekonomi dikarenakan adanya globalisasi. Regionalisme ekonomi merupakan pengintegrasian ekonomi berdasarkan kedekatan geografis. Regionalisme atau integrasi ekonomi ini bisa dikatakan merupakan kebutuhan bagi negara-negara berkembang maupun negara industri baru untuk mempertahankan diri dan menggalang persatuan menghadapi kekuatan ekonomi negara-negara maju. Contoh organisasi perdagangan yang dibentuk berdasarkan regionalisme yaitu ASEAN (*Association of South East Asian Nations*). ASEAN yang dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967, merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Anggota ASEAN saat ini berjumlah sepuluh negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam era globalisasi seperti saat ini, integrasi regional ASEAN mulai lebih memperhatikan pembentukan kerjasama ekonomi agar dapat tercipta suatu persiapan bersama sehingga negara-negara anggota ASEAN mampu menghadapi persaingan ekonomi dengan negara-negara lain. Kebutuhan untuk menguatkan ikatan regional sangat dirasakan oleh negara-negara ASEAN, mengingat tantangan besar yang akan dihadapi oleh ASEAN, dimana pada era pasar bebas negara-negara ASEAN akan saling berkonfrontasi secara ekonomi. Mantan sekjen ASEAN, Rudolfo C. Severino, Jr, mengatakan :

*“ Respon untuk menghadapi persaingan global harus dilakukan secara regional. ASEAN harus menguatkan ikatan solidaritasnya atau akan terpecah...Anggota ASEAN harus melakukan kerjasama yang lebih kuat jika ingin meningkatkan kekuatan ekonomi regional.”<sup>1</sup>*

Krisis keuangan Asia membuat negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya kekuatan dan peranan negara-negara Asia Timur Laut, karena diyakini bahwa mereka memiliki kekuatan ekonomi yang lebih baik dan lebih kuat sehingga ASEAN mengajak negara-negara Asia Timur Laut seperti China, Jepang, dan Korea Selatan untuk mengembangkan kerjasama regional secara lebih luas. Dengan demikian terbentuklah forum kerjasama yang dinamakan ASEAN Plus Three.

Kerjasama ASEAN Plus Three dimulai dengan dilakukannya pertemuan informal antara pemimpin ASEAN dan mitra mereka dari Asia Timur, yaitu China, Jepang dan Korea Selatan pada saat berlangsungnya *ASEAN Informal Summit* ke-dua di Kuala Lumpur, Malaysia pada Desember 1997. Pertemuan tersebut meliputi banyak diskusi dalam masalah-masalah finansial dan moneter. Namun baru pada tahun 1999 proses kerjasama ASEAN Plus Three ditetapkan sebagai forum resmi ketika para pemimpin kedua kawasan mengeluarkan Pernyataan Bersama Asia Timur (*Joint Statement of East Asia*) pada *ASEAN Plus Three (APT) Summit* ketiga di Manila. Dari sinilah dimulai kerjasama yang intensif. Saat itu para pemimpin ASEAN Plus Three menunjukkan ketetapan dan keyakinan yang tinggi dalam memperkuat dan memperdalam kerjasama Asia Timur di berbagai tingkat dan

---

<sup>1</sup> Rudolfo C. Severino, Jr. *ASEAN Rises to the Challenge*, ASEAN Secretariat, Jakarta, 1999.

bidang, khususnya di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan monitoring dan sharing informasi regional guna mengurangi resiko krisis yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam kerjasama ASEAN Plus Three ini Negara China menawarkan penekanan kerjasama di sektor pertanian, industri informasi dan komunikasi, pengembangan sumber daya manusia, dan investasi saling menguntungkan dalam pengembangan lembah sungai Mekong atau *Mekong River Basin*. Penawaran kerjasama tersebut juga direspon positif oleh negara-negara anggota ASEAN karena diyakini kerjasama yang dilakukan antara China dan ASEAN dapat membantu menjaga stabilitas perekonomian bagi negara-negara ASEAN.

Pertemuan negara-negara ASEAN dengan China yang kemudian disusul oleh pertemuan dengan Jepang dan Korea Selatan yang merupakan negara-negara besar di Asia Timur, dalam waktu yang tidak terlalu lama mengesankan kita bahwa China sangat antusias dalam bekerjasama dengan ASEAN, dan diwujudkan dalam bentuk kompetisi untuk merangkul ASEAN. Bila memperhatikan jarak waktu antara masuknya China dengan Jepang yang tidak terlalu lama mengesankan bahwa telah terjadi suatu persaingan antara China dan Jepang. Banyak analis yang berpendapat bahwa persaingan China dan Jepang untuk melembagakan kerjasama ekonomi regional lebih bermotifkan politis daripada ekonomis. Karenanya, kemudian keduanya melihat ASEAN sebagai perebutan kepemimpinan pembangunan ekonomi kawasan.

### **C. Perumusan Masalah**

Bagaimanakah peran pemerintah China dalam forum kerjasama ASEAN Plus Three?

### **D. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana peran dan kontribusi negara China dalam forum kerjasama ASEAN Plus Three, maka penulis akan menggunakan teori dan konsep yang sesuai dengan pembahasan diatas. Adapun teori dan konsep yang digunakan yakni sebagai berikut :

#### **1. Konsep Kerjasama Internasional**

Setiap negara di dunia ini bahkan negara-negara maju sekalipun pasti akan membutuhkan bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Hal ini dikarenakan sebuah negara memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu kerjasama internasional merupakan sebuah hal yang sangat penting dan mutlak untuk dilakukan bagi setiap negara. Kerjasama ini dilakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan fundamental dari kedua belah pihak.

Menurut Budiono Kusumahamidjojo, kerjasama internasional senantiasa membawa konsekuensi tertentu. Namun demikian suatu kerjasama senantiasa diusahakan justru karena manfaat yang diperoleh secara

proporsional adalah masalah lebih besar daripada konsekuensi yang harus ditanggung.<sup>2</sup>

Menurut K.J. Holsti, kerjasama diartikan :

*“Sejumlah pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi dan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menyelesaikan permasalahan tertentu serta mengakhiri perundingan dengan perjanjian atas pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak.”<sup>3</sup>*

Menurut pernyataan K.J. Holsti tersebut, proses kerjasama itu tercipta dikarenakan adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara tidak bisa terlepas dari hubungan antara satu dengan lainnya. Hubungan yang terjadi inilah yang biasa disebut dengan interaksi. Interaksi sendiri dapat merupakan suatu hubungan sosial yang dinamis antar orang-perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara kelompok manusia dengan orang-perorangan. Dalam era globalisasi frekuensi interaksi yang terjadi menjadi bertambah tinggi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Interaksi tersebut menyebabkan terbentuknya suatu kerjasama baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, politik dan lain sebagainya.

Adapun konsep kerjasama internasional tersebut sudah dibayangkan oleh program PBB dan tercermin dalam berbagai perkembangan hubungan internasional modern. Hubungan Internasional yang berdasarkan prinsip-

---

<sup>2</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis*, Jakarta, Binacipta, 1987, hal 1.

<sup>3</sup> K.J. Holsti, *Politik Internasional: Studi Analisis HI*, Erlangga, Jakarta, 1998, hal 89.



prinsip piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB yang relevan cenderung memajukan perdamaian dan keamanan dengan memperkuat ikatan antara negara, menciptakan hubungan antar mereka yang saling menguntungkan dan efektivitas kerjasama itu dapat terjamin dengan baik, dengan penataan kembali. Disamping itu hubungan tersebut juga akan lebih lancar apabila dilakukan tidak hanya terbatas antara pihak pemerintah saja tetapi juga melibatkan semua sektor masyarakat.<sup>4</sup>

Dari pengertian diatas, kerjasama internasional sangat perlu dilakukan tidak hanya terbatas oleh Negara tetapi juga oleh semua sektor masyarakat yang ada. Dalam hal ini kerjasama yang dilakukan oleh China dan ASEAN merupakan kerjasama Internasional yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Karena baik China maupun ASEAN saling membutuhkan satu sama lain untuk dapat menghadapi permasalahan globalisasi khususnya dalam bidang ekonomi. ASEAN melakukan kerjasama dengan China untuk memperbaiki stabilitas perekonomian mereka setelah terjadinya krisis finansial. Negara-negara ASEAN memiliki bahan baku yang dibutuhkan oleh China untuk keperluan Industrinya, sedangkan China membutuhkan pasar untuk barang-barang produksinya sehingga mudah tersebar di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia saja sudah banyak terdapat produk-produk yang berasal dari negara China hingga ke seluruh pelosok nusantara. Maka dari itu, baik China maupun ASEAN menyambut dengan baik adanya forum kerjasama

---

<sup>4</sup> Morgenthau, " *Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hubungan Antara Pelucutan Senjata dan Keamanan Internasional* ", New York, 1982 hal 86.

ASEAN Plus Three ini dengan harapan agar stabilitas perekonomian mereka dapat berjalan dengan baik.

## 2. Konsep Peran

Peran adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu. Ini adalah perilaku yang diletakkan pada suatu posisi. Setiap orang yang menduduki suatu posisi diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut. Dalam hal ini teori peran memandang bahwa, perilaku itu harus dipahami dalam konteks sosialnya. Kita tidak akan pernah bisa menjelaskan fenomena politik kalau kita hanya melihat individu terlepas dari konteks sosialnya. Perilaku para aktor selalu dibatasi oleh lingkungannya. Konsep peran menegaskan bahwa, perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan suatu peranan politik.

Menurut Jack C. Plano, yang dimaksud dengan peran dalam Kamus Analisa Politik diartikan sebagai perilaku yang diharapkan akan dilakukan seseorang yang menduduki posisi tertentu. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah sebagai akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang dipegang oleh seorang aktor politik.<sup>5</sup> Aktor politik menemukan dirinya dalam berbagai posisi, mulai dari aktor negara, presiden, menteri luar negeri, bahkan warga biasa sekalipun yang masing-masing posisi itu memiliki pola perilaku tersendiri. Sesuai dengan teori ini,

---

<sup>5</sup> Jack C. Plano, Robert E. Ringgs dan Helena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali, Jakarta, 1996, hal. 226.

harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup>

Menurut John Wahlke, teori peran mempunyai dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. *Pertama*, ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi, kegiatan politik seorang aktor baik individu, kelompok ataupun negara selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Kerangka berfikir teori peran memandang individu atau negara sebagai aktor yang bergantung dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. *Kedua*, teori peran mempunyai kemampuan mendeskripsikan intitusi secara behavioral. Dalam pandangan teoritis peran, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peran. Teori peran menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai intitusi. Dengan demikian, teori peran menjembatani antara pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Dalam konsep peran, kita masih bisa membahas perilaku Negara dalam arti peran sebagai aktor politik, kelompok maupun individu. Dan peran-peran ini adalah komponen-komponen yang membentuk institusi. Institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> SP. Varma, *Teori Politik Modern*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

<sup>7</sup> Mochtar Mas'od, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990.

Negara sebagai aktor internasional berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi secara internasional dalam hal yang berbeda-beda, dengan demikian adanya peranan Negara dapat memberikan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu di lingkungan internasional. Dapat dikatakan bahwa Negara China sebagai aktor internasional yang memilih untuk menjalin kerjasama dalam ASEAN Plus Three merupakan reaksi dari situasi internasional yang muncul. Peran Negara China dalam kerjasama ASEAN Plus Three menggambarkan adanya interaksi sosial antara China dengan ASEAN. Dalam hal ini peran yang dijalankan oleh Negara China terhadap kerjasama yang dilakukan dengan ASEAN dalam forum kerjasama ASEAN Plus three merupakan sebuah peran yang sangat penting baik bagi ASEAN maupun bagi China sendiri. Karena China merupakan negara yang memiliki perekonomian yang kuat dan stabil terutama di kawasan Asia, sehingga diyakini dapat menjadi pendorong munculnya gagasan-gagasan ekonomi baru yang dapat menguntungkan bagi China dan ASEAN.

#### **E. Hipotesa**

Berdasarkan aplikasi dari teori dan pokok permasalahan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa peran yang dilakukan oleh pemerintah China dalam forum kerjasama ASEAN Plus Three ini adalah sebagai pendorong institusionalisasi pasar bebas dalam forum kerjasama ASEAN Plus Three.

## **F. Metode Penelitian**

Suatu penelitian metode sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan penelitian sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keberadaan metode merupakan salah satu syarat diakuinya sesuatu menjadi ilmu pengetahuan, disamping syarat-syarat yang lain yakni mempunyai objek, sudut pandang terhadap obyek metode serta hasil-hasil pandangannya merupakan suatu kesatuan utuh dan bulat atau sistematis.<sup>8</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan pada teori, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, internet, Koran dan penerbitan berkala lain sebagai sumber data.

## **G. Tujuan Penelitian**

1. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjawab tentang bagaimana peran dan kontribusi yang dilakukan China dalam forum kerjasama ASEAN Plus Three.
2. Untuk membuktikan teori dan konsep yang pernah diperoleh selama menempuh studi Ilmu Hubungan Internasional.

---

<sup>8</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito 1980, hal 2.

## **H. Jangkauan Penulisan**

Jangkauan penulisan skripsi ini mulai pada tahun 1997, dimana pada saat itu muncul pemikiran untuk mengembangkan regional yang lebih luas dan diadakannya pertemuan ASEAN Plus Three yang pertama, hingga tahun 2010-2011. akan tetapi tidak menutup kemungkinan pula bagi penulis untuk mencantumkan data-data diluar jangkauan penelitian, dengan tujuan hanya sebagai sebuah referensi atau catatan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I :**

Pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II :**

Dijelaskan mengenai dinamika politik luar negeri China secara umum, hubungan politik luar negeri China dan Asia Tenggara, terutama dalam bidang ekonomi. Dan terakhir adalah kebijakan ekonomi China dan pertumbuhan Asia Tenggara.

### **BAB III :**

Membahas mengenai proses terbentuknya ASEAN Plus Three serta tujuan dan hambatan dalam pembentukan kerjasama tersebut. Akan dijelaskan pula posisi China dalam ASEAN Plus Three.

### **BAB IV :**

Dibahas mengenai peran yang dilakukan oleh pemerintah China dalam forum kerjasama ASEAN Plus Three sebagai pendorong intitusionalisasi kerjasama ASEAN Plus Three melalui ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Dijelaskan pula bahwa China berperan sebagai inisiator dan pelaksana dengan menandatangani kesepakatan kerjasama dalam ACFTA.

### **BAB V. KESIMPULAN**